

1950	Indonesia menjadi anggota ILO
1950	Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 29 tentang <i> KERJA PAKSA</i>
1957	Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang <i>HAK UNTUK BERSERIKAT DAN BERUNDING BERSAMA</i>
1958	Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang <i>KESETERAAN PENDAPATAN</i>
1970	ILO mendirikan kantor di Jakarta
1971	ILO mendukung pendirian pusat pelatihan kerja di Irian Jaya (sekarang Papua dan Papua Barat)
1975	ILO mendukung Pusat Pelatihan Koperasi Nasional (1975-1982)
1975	ILO/Bank Dunia/UNDP memulai upaya peningkatan kapasitas teknis dan peralatan pelatihan pusat pelatihan kerja di seluruh Indonesia (1975-1982)
1976-1981	ILO mendukung Departemen Tenaga Kerja dengan mendirikan Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Informasi Pasar Kerja, Pusat Produktivitas Kerja Nasional, Kurikulum Pelatihan Kerja Nasional dan Skema Jaminan Nasional bagi Pekerja (sekarang Jamsostek)
1977	ILO mendukung prakarsa Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan standar internasional untuk hotel dan pariwisata di Bali (sekarang dikenal sebagai Lembaga Pariwisata Bali) (1977-1984)
1985	ILO mendukung penguatan Pusat Rehabilitasi Nasional bagi penyandang cacat di Solo, Jawa Tengah dan pusat di tingkat provinsi di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan (1985-1988)
1992	ILO memulai Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) di Indonesia
1998	Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tentang <i>KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK UNTUK BERUNDING BERSAMA</i>
1999	Indonesia meratifikasi Konvensi ILO tentang <i>PENGHAPUSAN KERJA PAKSA</i> (No. 105), <i>DISKRIMINASI DALAM KERJA DAN JABATAN</i> (No. 111) dan <i>Batasan Usia Minimum untuk Bekerja</i> (No. 138)
1999	Proyek Pendidikan Pekerja ILO memfokuskan pada pelatihan perwakilan pekerja dalam perundingan bersama, kesehatan dan keselamatan dan serikat pekerja di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Sumatra Utara (1999-2003)
2000	Indonesia menjadi negara pertama di Asia untuk meratifikasi kedelapan Konvensi-konvensi mendasar ILO, dengan diratifikasinya Konvensi No. 182 tentang

	Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
2000	Undang-Undang Serikat Pekerja No.21 Tahun 2000 disahkan untuk menformalisasi dan menegaskan kembali pengakuan terhadap hak untuk berserikat bagi pekerja dan pengusaha. Sekitar 90 federasi serikat pekerja nasional dan lebih dari 12.000 serikat pekerja di tingkat unit kerja telah berdiri dan terdaftar. APINDO memperkokoh perannya sebagai perwakilan utama pengusaha
2001	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dibentuk
2001	Proyek Deklarasi ILO tentang Hubungan Industrial dimulai dengan tujuan membangun sistem hubungan industrial yang harmonis untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan menjamin hak para pekerja (2001-2006)
2002	Rencana Aksi untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak – industri perikanan dan alas kaki (1999-2004), Program Terikat Waktu tahap I (2004-2007) dan tahap II (2007-2011)
2003	Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 disahkan pada Februari 2003. Undang-Undang ini menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif yang menangani beragam permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial
2003-2004	Komitmen Tripartit untuk Memerangi HIV dan AIDS di Dunia Kerja diadopsi (2003) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja. Program ILO tentang pendidikan HIV dan AIDS di tempat kerja (2004-2009)
2003-2004	Indonesia menjadi negara perintis dalam Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda (Youth Employment Network) (2003) dan mengadopsi Rencana Aksi Nasional untuk menanggulangi masalah pengangguran muda. Program-program ILO mendukung Indonesia untuk menanggulangi tantangan ketenagakerjaan muda (2004-2006) dan mempromosikan kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan muda (2006-2010)
2004	Menyusul pengesahan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004, Indonesia menyelesaikan program reformasi perundang-undangan ketenagakerjaan sejalan dengan komitmen reformasi untuk meratifikasi dan menerapkan semua Konvensi mendasar ILO (dengan disahkannya peraturan-peraturan baru tentang serikat pekerja, ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan kerja)

2004	ILO memulai program untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak pekerja migran, dengan fokus awal pada pekerja domestik migran (2004-2006) dan diperpanjang untuk mencari para pekerja lainnya, terutama jika melibatkan perdagangan (2006-2011)
2005	Pedoman Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Penegakkan Hukum dan Ketertiban dalam Perselisihan Hubungan Industrial diadopsi oleh Kepolisian Indonesia.
2005	Panduan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja, mempromosikan kesetaraan di tempat kerja
2005	Program ILO dimulai untuk mempromosikan keamanan dan mengurangi kemiskinan masyarakat hukum adat di Papua (2005-2008)
2005	ILO memulai program untuk mendukung pemulihan Aceh dan Nias, menyusul terjadinya tsunami dan gempa bumi , termasuk dengan pusat ketenagakerjaan, pelatihan kerja, usaha dan kewirausahaan, rehabilitasi jalan dan infrastruktur lainnya, dan pembangunan kapasitas pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja (2005-2011)
2006	<i>Program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia 2006-2010</i> diadopsi
2006	Indonesia meluncurkan Panduan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak, mendorong pembentukan kerangka kerja hukum dan kebijakan di semua tingkatan untuk melindungi pekerja rumah tangga anak
2006	Perangkat pendidikan kewirausahaan ILO diadopsi dalam sekolah-sekolah menengah kejuruan
2007	Proyek ILO tentang Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (EAST) dimulai dengan dukungan Pemerintah Belanda. Proyek ini menangani masalah pendidikan, pekerja anak dan ketenagakerjaan muda dan dilaksanakan di daerah timur Indonesia dan Aceh (2007-2011)
2008	Ratifikasi Konvensi ILO No. 185 tentang <i>Dokumen Identitas Pelaut</i> , dan menjadikan keseluruhan 18 Konvensi ILO yang sudah diratifikasi oleh Indonesia hingga saat ini
2009	ILO membantu Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah dengan memberikan saran untuk memaksimalkan keuntungan kerja dalam program pembangunan infrastruktur.



Key Milestones for Indonesia and the ILO



Kantor ILO Jakarta
 Menara Thamrin Lantai 22
 Jl. M. H. Thamrin Kav. 3
 Jakarta 10250
 Telp. 021 391 3112
 Faks. 021 310 0766
 Email: jakarta@ilo.org
 www.ilo.org/jakarta



90 years working for social justice

1950	Indonesia becomes member of ILO
1950	Indonesia ratifies ILO Convention No. 29 on <i>Forced Labour</i>
1957	Indonesia ratifies ILO Convention No. 98 on <i>Right to Organize and Collective Bargaining</i>
1958	Indonesia ratifies ILO Convention No. 100 on <i>Equal Remuneration</i>
1970	ILO establishes an office in Jakarta
1971	ILO supports establishment of vocational training centre in Irian Jaya (now Papua and West Papua)
1975	ILO support for National Training Centre for Cooperatives (1975-1982)
1975	ILO/World Bank/UNDP begin support for improvement of technical capacity and training equipment of vocational training centres throughout Indonesia (1975-1982)
1976-1981	ILO assists Ministry of Manpower with establishment of Labour Safety and Health Centre, Labour Market Information System, National Labour Productivity Centre, National Vocational Training Curricula and the Social Security Scheme for Workers (now Jamsostek)
1977	ILO supports Indonesian Government initiative to develop an international standard hotel and tourism school in Bali (now known as Bali Tourism Institute) (1977-1984)
1985	ILO supports strengthening National Rehabilitation Centre for disabled people in Solo, Central Java and the regional centre in Ujung Pandang, South Sulawesi (1985-1988)
1992	The ILO begins its International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) in Indonesia
1998	Indonesia ratifies ILO Convention No. 87 on <i>Freedom of Association and Protection of the Right to Organize</i>
1999	Indonesia ratifies ILO Conventions on <i>Abolition of Forced Labour</i> (No. 105), <i>Discrimination in Respect of Employment and Occupation</i> (No. 111) and <i>Minimum Age for Admission to Employment</i> (No. 138)
1999	ILO Workers Education project focusing on training workers' representatives in collective bargaining, health and safety and union organization in Jakarta, Central & East Java and North Sumatra (1999-2003)
2000	Indonesia becomes the first Asian country to ratify all eight ILO fundamental Conventions following

	ratification of Convention No. 182 on Elimination of the Worst Forms of Child Labour
2000	Trade Union Act No.21 of 2000 enacted to formalize and reaffirm the recognition of the right to organize of workers and employers. Some 90 national trade union federations and more than 12,000 plant-level unions have now been established and registered. APINDO strengthens its role as key employer representative body
2001	National Action Committee on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour established
2001	ILO Declaration Industrial Relations Project commences with objective to help build a sound and harmonious industrial relations system to promote economic growth and guarantee workers' rights (2001-2006)
2002	National Action Plan for Elimination of the Worst Forms of Child Labour adopted. ILO Projects to support elimination of the worst forms of child labour – fishing and footwear industries (1999-2004). Time Bound Programme phase I (2004-2007) and phase II (2007-2011)
2003	Manpower Act No.13 of 2003 enacted in February 2003. The Act creates a comprehensive legal framework governing a wide range of employment and industrial relations matters
2003-2004	Tripartite Commitment to Combat HIV and AIDS in the World of Work adopted (2003) and Decree of Minister of Manpower No. 68 of 2004 on HIV and AIDS Prevention and Control in the Workplace. ILO programme on HIV & AIDS workplace education (2004-2009)
2003-2004	Indonesia becomes a lead country in Youth Employment Network (2003) and adopts National Action Plan to address youth unemployment. ILO programmes to assist Indonesia address the challenge of youth employment (2004-2006) and to promote job opportunities for young women and men (2006-2010)
2004	Following the enactment of the Industrial Relations Dispute Settlement Act No. 2 of 2004, Indonesia completes labour law reform programme begun pursuant to the reformasi commitment to ratify and implement all ILO fundamental Conventions (with new laws on trade unions, manpower matters and labour dispute settlement)
2004	ILO commences programme to promote and protect the rights of migrant workers, initially focusing on migrant domestic workers (2004-2006) and then extended to cover

	other migrant workers, especially where trafficking is involved (2006-2011)
2005	Guidelines on the Conduct of Police in Handling Law and Order in Industrial Disputes adopted by Indonesian National Police
2005	Equal Employment Opportunity Guidelines released by Manpower Ministry, promoting equality at the workplace
2005	ILO programme commences to promote human security and reduce poverty among indigenous people of Papua (2005-2008)
2005	ILO begins programmes to support recovery of Aceh and Nias following tsunami and earthquakes, including with emergency employment centres, vocational training, business and entrepreneurship training, rehabilitation of roads and other infrastructure, and capacity building for government, employers' and workers' organizations (2005-2011)
2006	Indonesia <i>Decent Work Country Programme</i> 2006-2010 adopted
2006	Indonesia releases Guidelines on the Protection of Child Domestic Workers, encouraging good practices and the establishment of legal and policy frameworks at all levels to protect child domestic workers
2006	ILO entrepreneurship education tools adopted into national curriculum of vocational secondary schools
2007	ILO project on Education and Skills Training (EAST) commences with support from the Netherlands Government. The project addresses education, child labour and youth employment challenges and focuses on eastern Indonesia and Aceh (2007-2011)
2008	Ratification of ILO Convention No. 185 on <i>Seafarers' Identity Documents</i> (SID) making a total of 18 Conventions ratified by Indonesia to date
2009	ILO assists Government Economic Stimulus Package with advice on maximising employment benefits of infrastructure development programme

ILO Jakarta Office
 Menara Thamrin Level 22
 Jl. M. H. Thamrin Kav. 3
 Jakarta 10250
 Tel. 021 391 3112
 Fax. 021 310 0766
 Email: jakarta@ilo.org
 www.ilo.org/jakarta



Tonggak Pencapaian untuk Indonesia dan ILO



90 Tahun berkarya demi keadilan sosial